

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Ketika suatu perusahaan mulai berkembang dan bertambah besar maka pemilik perusahaan memutuskan untuk mengambil dana dari luar yang berasal dari perbankan dan pasar modal. Dana yang berasal dari perbankan jumlahnya relatif kecil dan biaya modalnya pada umumnya relatif mahal, sedangkan dana dari pasar modal jumlahnya relatif besar dan biaya modalnya relatif kecil. Oleh karena itu banyak perusahaan besar memutuskan untuk go public dengan menjual saham ke pasar modal. Menjual saham ke pasar modal berarti menjual sebagian kepemilikan kepada pihak lain. Dengan demikian pemilik perusahaan harus berbagi kekuasaan dengan pemegang saham baru. Namun pemilik perusahaan pada umumnya tidak mau begitu saja melepas kontrol atas perusahaan. Kontrol terhadap perusahaan akan tetap berada pada pemilik perusahaan karena masih memiliki saham mayoritas.

Upaya pengembangan *corporate governance* ditujukan untuk mendorong optimalisasi alokasi atau penggunaan sumber daya perusahaan agar pertumbuhan dan kesejahteraan pemilik tetap terjaga. *Good corporate governance* merupakan suatu pengelolaan yang baik di dalam sebuah organisasi. Menurut Hamid (2003), penerapan *good corporate governance* (selanjutnya disingkat GCG) merupakan sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholders*).

Yang termasuk *stakeholders* adalah para pemegang saham (*shareholders*), *senior leaders*, karyawan (*employees*), manajemen perusahaan (*executives*), pemerintah (*government*), pelanggan (*customers*) dan *stakeholders* yang lain. Jika pemegang saham mayoritas melakukan tindakan – tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas maka akan menyebabkan jatuhnya harapan investor dari pengembalian investasi yang akan mereka tanamkan. Dua hal yang menjadi perhatian dalam konsep ini adalah pertama kepentingan hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (*akurat*) dan tepat pada waktunya, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat tepat pada waktunya, dan kemampuan mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemegang *kepentingan (stakeholder)* Uswatun Chasanah ( 2007 ) *Corporate governance* pada dasarnya menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan.

Adanya kepemilikan mayoritas dalam suatu perusahaan akan menimbulkan kemungkinan konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Konflik ini dapat dilihat dalam kerangka masalah agensi. Sebagai *principal* dalam hal ini adalah pemegang saham minoritas sedangkan pemegang saham mayoritas sebagai *agen*. Konflik yang muncul ini dinamakan konflik keagenan (*agency konflik*) dan teorinya disebut teori keagenan (*agency theory*). Konflik ini dapat dilihat dalam kerangka masalah agensi. Teori keagenan mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham

manajemen (pemilik) dengan pemegang saham minoritas. Teori keagenan terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Pemisahan fungsi antara pemilik dan manajer memiliki dampak negatif yaitu keleluasaan manajemen (pengelola) perusahaan untuk memaksimalkan laba sehingga akan mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Sebagai agen, eksekutif secara moral bertanggung jawab memaksimalkan laba pemegang saham.

Pemanganan masalah agensi merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk mewujudkan good cooperate governance terutama pada perusahaan yang *go public*. Pada saat ini cooperate governance merupakan permasalahan yang sangat disorot oleh investor di pasar modal. Hasil survey yang dilakukan oleh McKinsey dan Watson ( 2000 ), memperlihatkan bahwa investor bersedia memberikan dana kepada perusahaan yang bagus corporate governance-nya. Secara empiris terbukti bahwa investor bersedia memberi premium yang cukup tinggi kepada perusahaan yang menerapkan prinsip corporate governance secara konsisten ( Lukuhay,2002; Rafiek 2002 ).selain itu survei yang di lakukan McKinsey juga menemukan bukti tambahan bahwa saham perusahaan yang dinilai menikmati valuasi pasar sampai 10 % - 20 %. Meskipun merupakan hal yang sangat penting masih banyak perusahaan yang kurang peduli terhadap corporate governance. Sedangkan masalah agensi juga merupakan faktor penting dalam cooperate governance.

Maka untuk mendorong penerapan corporate governance dan meningkatkan keterbukaan dalam informasi keuangan, beberapa institusi

komite Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) memberikan penghargaan berupa ARA (Annual Report Award) kepada perusahaan go public yang dinilai telah memberikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahun. Penghargaan Annual Report Award (ARA) ini diberikan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan tahun 2002, khususnya informasi mengenai profil perusahaan, pengungkapan visi dan misi perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan corporate governance, pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan pasar modal yang berlaku serta informasi yang relevan dengan kebutuhan pemodal (Bapepam 2002).

Masalah agensi dan corporate governance merupakan dua hal yang saling terkait. Dalam perusahaan, masalah agensi lebih menaruh perhatian pada hubungan antara manajer dengan pemegang saham yang tidak terlibat dalam manajemen, sedangkan corporate governance melihat hubungan antara manajer dan seluruh stakeholders perusahaan. Corporate governance memiliki prinsip utama transparansi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban sehingga perusahaan yang corporate governance-nya baik semestinya akan dapat mengurangi masalah agensi.

Melihat keterkaitan antara masalah agensi dan corporate governance tersebut, sampoknya efektifitas mekanisme pengurang masalah agensi akan

ditanyakan oleh bagaimana praktek corporate governance di masing – masing perusahaan. Pencarian mekanisme pengurang masalah agensi dalam konteks pasar modal di Indonesia sangat penting dilakukan karena jika mekanisme yang efektif ditemukan maka kepercayaan investor terhadap pasar modal akan meningkat dan pada akhirnya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Zaenal Arifin dan Nina Darmaswati ( 2007 ) dengan judul Pengaruh Corporate Governance Terhadap Efektivitas Mekanisme Pengurang Agensi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel pengamatan dan sampel perusahaan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan corporate governance sebagai variabel independen yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, anggota dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris. Data perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah data kinerja perusahaan pada periode berikutnya yaitu 2006 – 2008 dan perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang masuk dalam kategori nominasi ARA ( Annual Report Award ). Sedangkan variabel penelitian terdahulu menggunakan proporsi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, peningkatan porsi hutang sebagai variabel independen. Data yang dipergunakan dalam penelitian terdahulu adalah data kinerja perusahaan tahun 2004 – 2006 dan perusahaan yang diteliti adalah perusahaan publik yang terdaftar di BEI ( Bursa Efek Indonesia ).

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian ini adalah **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS PENGURANG MASALAH AGENCY”**.

### 1.2.1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Sebuah mana mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap efektivitas pengurang masalah

### 1.2.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh *corporate governance* dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap efektivitas pengurang masalah agency.

### 1.2.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi investor dan masyarakat dapat memperoleh gambaran dan informasi mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap efektivitas pengurang masalah agency pada perusahaan – perusahaan yang go public di Indonesia. Sehingga investor maupun masyarakat dapat membuat keputusan investasi yang tepat.
2. Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran tentang pentingnya penerapan *corporate governance*

untuk kemajuan perusahaan sehingga penerapan corporate governance dapat memberikan pengaruh positif untuk perusahaan.

- ii Manfaat bagi Ilmu Ekonomi diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan akuntansi khususnya Akuntansi Manajemen tentang mekanisme corporate governance yang berbasis pada teori agensi.